

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan hal utama yang dilihat oleh investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan tinggi, maka tingkat kesejahteraan pemegang saham akan semakin tinggi. Nilai perusahaan juga dapat menggambarkan status perusahaan, semakin baik nilai perusahaan maka akan semakin baik pula pengamatan terhadap perusahaan oleh calon investor, begitu pula sebaliknya. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan dan bagaimana memberikan deviden (bagi hasil) kepada pemegang saham sehingga dapat berinvestasi dalam jangka panjang.

Tidak setiap perusahaan memiliki nilai yang sama. Setiap investor memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi informasi terkait kinerja perusahaan. Perusahaan yang terbuka akan menerbitkan laporan keuangan agar investor dapat melihat kinerja perusahaan melalui keuntungan perusahaan. Jika laba perusahaan tinggi, investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan, dan harga saham tersebut kemudian akan naik. Jika laporan keuangan perusahaan menunjukkan kerugian atau penurunan laba, investor akan cenderung menjual saham yang dimilikinya, yang akan menurunkan harga saham dan menurunkan nilai perusahaan. Bagi pemilik dan calon pemilik, nilai suatu perusahaan mendapat perhatian yang besar karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan ekuitas pemilik. Jika harga saham suatu perusahaan tinggi maka nilai perusahaan tersebut akan tinggi (Monica & Hamfri, 2015).

Banyaknya peluang investasi sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dana yang diperoleh dari investor dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan, membuatnya tumbuh lebih kuat dan bersaing dengan perusahaan lain. Peluang investasi ini akan memberikan sinyal positif bagi perkembangan perusahaan ke depan. Pasar modal memberikan solusi bagi perusahaan publik (*Go Public*) yang ingin

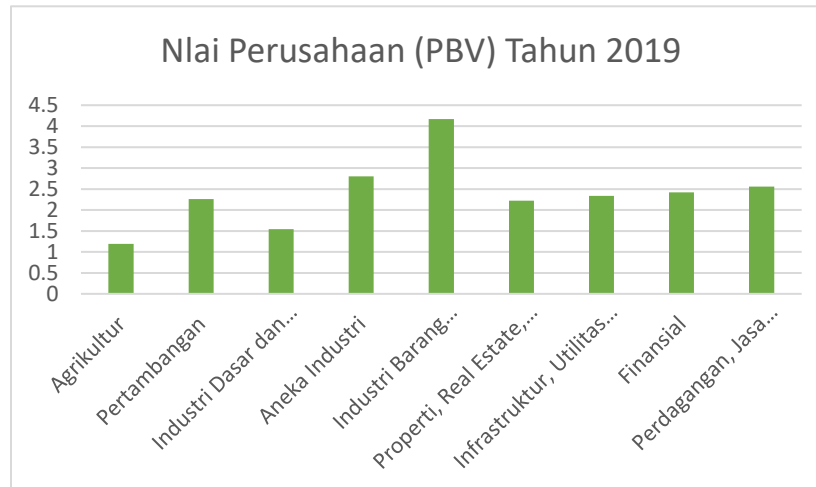
menjual sahamnya kepada publik atau menjadi perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memutuskan *go public* akan mendapatkan sumber dana baru untuk mengembangkan usahanya, melunasi pinjaman atau meminjam dari bank, meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Sejak perusahaan melaporkan kinerja keuangannya kepada publik, masyarakat dan semua pihak yang terkait dengan perusahaan dapat mempercayai mereka sehingga dapat memperoleh beberapa keuntungan.

Selama 2019, 55 perusahaan mengubah identitas perusahaan menjadi go public. Hal tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia yaitu mendatangkan 57 emiten baru ke pasar modal melalui rencana penawaran umum perdana (cnbcindonesia.com, 23/12/2019). Jumlah emiten sama dengan tahun 2018 yaitu 55 perusahaan. Di Bursa Efek Indonesia, perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa industri sesuai dengan jenis industrinya. Berikut ini 9 sektor perusahaan dan jumlah perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia:

1. Agrikultur
2. Pertambangan
3. Industri Dasar dan Kimia
4. Aneka Industri
5. Industri Barang Konsumsi
6. Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan
7. Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
8. Finansial
9. Perdagangan, Jasa dan Investasi

Sebelum berinvestasi, investor bisa mempertimbangkan harga saham perusahaan. Harga saham sama dengan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan maka investor akan membayar harga saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, karena hal tersebut akan menambah kekayaan pemegang saham. Nilai perusahaan juga dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah *Price Book Value* (PBV). *Price Book Value* (PBV) adalah harga per saham dibagi dengan nilai buku saham. PBV juga didefinisikan sebagai apresiasi pasar terhadap nilai buku

perusahaan. Semakin besar PBVnya, semakin besar kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Berikut ini adalah grafik nilai perusahaan seluruh sektor yang diukur dengan PBV pada tahun 2019:



Grafik 1. 1 Nilai Perusahaan (PBV) Tahun 2019

Sumber: www.idx.co.id, data diolah

Grafik 1.1 menunjukkan nilai PBV sektor pertanian 1,19, pertambangan 2,26, sektor industri dasar dan kimia 1,54, sektor aneka industri 2,80, real estat dan konstruksi bangunan 2,22, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi 2,34, Industri keuangan 2,42 dan industri perdagangan, jasa dan investasi memiliki nilai PBV 2,56. Industri barang konsumsi memiliki nilai PBV yang lebih tinggi yaitu 4,17. Investor menilai industri komoditas dan konsumen memiliki keunggulan yang cukup besar, sehingga nilai perusahaan di industri tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan sektor dengan nilai korporasi terendah adalah sektor agrikultur dengan nilai PBV 1,19. Seiring dengan perubahan nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, setiap perusahaan di setiap sektor perlu meningkatkan strateginya untuk meningkatkan kinerja korporasi dan menarik investor untuk berinvestasi. Jika perusahaan dapat memberikan keuntungan terbesar kepada pemegang saham, maka perusahaan akan bertahan dan tumbuh untuk waktu yang lama.

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan, perusahaan tersebut tentu akan mengalami hambatan atau masalah. Perusahaan akan mengalami konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan (pemegang saham) yang sering disebut *agency problem*. Karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen, muncul masalah agensi (*agency problem*) yang mencakup masalah *agency cost* dan pemantauan yang dilakukan oleh prinsipal. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda dan tujuan yang tidak searah dengan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham ini mengakibatkan munculnya konflik yang disebut dengan konflik agensi, perbedaan pendapat terjadi karena pihak manajemen mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan pihak pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dan lebih mementingkan berapa biaya yang digunakan dalam perusahaan karena biaya tersebut akan mempengaruhi keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Selain itu, konflik keagenan juga dapat terjadi karena pemegang saham mendapatkan keuntungan dari profitabilitas perusahaan. Pemegang saham tidak mengetahui apa yang dilakukan manajemen untuk menghasilkan profitabilitas tersebut. Hal ini menyebabkan asimetri informasi, dimana manajemen memiliki lebih dari sekedar pemegang saham. informasi perusahaan. Karena asimetri informasi ini, pemegang saham khawatir apakah mereka tidak dapat memantau kinerja mereka. Riset mengenai *agency problem* sudah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan proksi yang beragam. Seperti rasio perputaran aset (Saputro & Syafruddin, 2012; Zheng, 2013; Handayani & Yuniasih, 2014; Sugama, 2018), rasio pengeluaran (Layyinaturrobaniyah et al., 2014; Chamidah & Asandimitra, 2017), *free cash flow* (Wang, 2010; Kargar & Ahmadi, 2013; Shaifali & Mittal, 2019), *executive compensation* (Bebchuk & Fried, 2003).

Hal yang dilakukan untuk mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh asimetri informasi perusahaan, yaitu melalui kompensasi eksekutif. Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa perusahaan perlu bekerja keras untuk mengurangi masalah perusahaan yang disebabkan oleh kurangnya informasi karena

adanya kontrak antara prinsipal dan agen. Hal inilah yang menjadi dasar teori keagenan dan bukti yang salah digunakan dalam beragumentasi. Berawal dari teori ini, hasil penelitian yang diperoleh para ahli menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan. Karena pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, maka dapat diasumsikan juga akan berdampak pada nilai perusahaan.

Kompensasi eksekutif adalah kompensasi yang diterima eksekutif dari perusahaan, biasanya berupa gaji, bonus, call option pada saham atau saham perusahaan, benefit dan pendapatan tambahan (Widjayanti, 2017). Di penghujung tahun 2005, kompensasi eksekutif Indonesia sendiri sempat menjadi topik hangat, ketika Gubernur Bank Indonesia mengusulkan agar gaji dan tunjangan Gubernur BI pada tahun 2006 mencapai Rp.2,6 miliar setahun atau Rp.223,7 juta per bulan, sedangkan gaji Presiden Republik Indonesia hanya Rp. 62,7 juta per bulan (Vidyatmoko, 2010). Pengungkapan kompensasi eksekutif dianggap sulit, karena meskipun perusahaan telah mempublikasikannya, namun tetap dianggap tidak tepat untuk mengungkapkan gaji kepada public meskipun perusahaan tersebut sudah *go public*.

Selain menerapkan kompensasi eksekutif untuk mengurangi konflik keagenan, perusahaan juga perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem pengendalian perusahaan akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan dan membawa manfaat bagi pemegang saham dan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan Indonesia untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Seperti halnya PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang banyak menyedot perhatian karena korupsi di tujuh proyek berbeda, salah satunya kasus korupsi Rumah Sakit Universitas Udayana tahun 2009-2010 (cnbcindonesia.com, 7/01/2019). Bisnis konstruksi tidak serta merta harus menjaga citra perusahaan yang konsisten. Namun, karena standar yang diharapkan peserta tender proyek mungkin memerlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik

(GCG), perusahaan konstruksi mungkin akan kesulitan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan saham DGIK turun 30 poin (-30%) ke level saham Rp70. Saat transaksi dimulai, harga saham DGIK langsung turun 1 poin menjadi Rp99 per saham. Dan penurunan terus berlanjut hingga pasar tutup (investing.com, 17/7/2017).

Dilihat dari fenomena tersebut, terdapat mekanisme dalam sistem “*good corporate governance*” yang dapat mempengaruhi investor yang menanamkan modalnya sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Konsep *good corporate governance* sendiri tidak hanya dapat membantu suatu perusahaan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* yang berpartisipasi dalam perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efektif, transparan, dan patuh. Tata kelola perusahaan adalah subjek yang melibatkan banyak aspek. Salah satu aspek yang terlihat adalah akuntabilitas dan tanggung jawab, terutama penerapan standar dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham (Pertiwi & Pratama, 2012).

Mekanisme *good corporate governance* dijadikan sebagai alat yang mengatur jalannya perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Secara umum terdapat 4 (empat) komponen utama dalam Good Corporate Governance yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility*. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa indikator pendukung mekanisme GCG, seperti komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, kualitas audit, dan komisaris independen. Penerapan dari mekanisme *good corporate governance* dapat meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Di Indonesia, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sudah diterapkan dan dilampirkan dalam laporan tahunan setiap perusahaan. Dengan adanya aturan yang berlaku maka perusahaan bisa menjalankan perusahaan dengan baik dan sehat sehingga tidak ada konflik di dalam maupun luar perusahaan yang dapat merugikan dan bisa berakibat pada nilai atau kinerja perusahaan.

Penelitian terkait dengan *Good Corporate Governance* sudah banyak dilakukan dengan menggunakan proksi jumlah dewan direksi (Muryati & Suardikha, 2014; Syafitri et al., 2018), jumlah dewan komisaris independen (Purbopangestu, 2014; Sianturi & Ratnaningsih, 2015; Febrianti & Dewi, 2019), jumlah rapat dewan komisaris (Wiguna & Yusuf, 2019; Putri, R. K., & Muid, D., 2017), komite audit (Amrizal & Rohmah, 2017; Sondokan dkk., 2019; Amaliyah & Herwiyanti, 2019) serta struktur kepemilikan (Fanani, 2016; Fahdianyah dkk., 2018). Pada penelitian ini, *good corporate governance* akan menggunakan proksi dewan direksi, dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Penelitian mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan. Penelitian tentang pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan menimbulkan beragam hasil. Penelitian yang dilakukan Onasis & Robin (2016), Wibowo (2016), dan Syafitri, T., Nuzula, N. F., & Nurlaily, F. (2018) mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris independen telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain oleh Setiadi dkk., (2017), Oktari, V., Mela, N. F., & Zarefar, A. (2018) yang mendapatkan hasil bahwa adanya dewan komisaris dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2017) dan Gosal, M. M., dkk., (2018) para peneliti menemukan bahwa tidak adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Untuk penelitian pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh Astrini dkk., (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap nilai perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber, (1996), Al Najjar (2012), dan Prasetyo (2014). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Putra (2016) serta Wiguna & Yusuf (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh rapat dewan komisaris terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang beragam ini disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya jangka waktu atau tahun yang digunakan dalam penelitian, informasi yang

diungkapkan perusahaan, sampel data yang digunakan, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan berbagai hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji ulang variabel penelitian berdasarkan rekomendasi peneliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh kompensasi eksekutif dan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang semakin menambah pengetahuan tentang pengaruh *conflict agency* yang di proksikan dengan Kompensasi Eksekutif dan penerapan *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris. Sehingga peneliti mengambil judul “**PENGARUH CONFLICT AGENCY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA**”.

1.1 Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik keagenan dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Konflik keagenan disebabkan oleh teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual antara pemberi wewenang (*principal*), yaitu pemegang saham dan yang menerima wewenang (agen), yaitu manajer. Proksi yang digunakan untuk memeriksa *conflict agency* adalah kompensasi eksekutif. Dalam hal ini pemberian kompensasi eksekutif dapat dijadikan motivasi bagi para eksekutif untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mengurangi benturan kepentingan maka perlu dibentuk mekanisme kontrol dan regulasi yang dapat menjadi pedoman operasional perusahaan. Salah satunya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka ini dijadikan acuan untuk melihat bagaimana nilai perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan apakah konflik yang dialami oleh perusahaan

mempengaruhi nilai perusahaan. Terdapat beragam proksi yang digunakan peneliti sebelumnya yang dijadikan indikator untuk meneliti *good corporate governance*. Dalam penelitian ini proksi yang akan digunakan yaitu jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Conflict Agency* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *conflict agency* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran baru bagi penulis atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian khususnya akuntansi dan menjadi referensi

penelitian selanjutnya mengenai *Conflict Agency* dan *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konflik keagenan, penerapan *Good Corporate Governance* dan nilai perusahaan yang menjadi hal penting dalam perusahaan. Serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penerapan tata kelola perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan dan mengatasi masalah keagenan yang dialami perusahaan.